Juni 2019

Volume 2, Nomor 6

Daftar Isi:

Great Giant Foods	1
Magang Petani Muda	2
Mitra Baru Pemagangan	3
Mango Network	4
Kebijakan Energi Terbarukan	5
Negotiation Lunch	6
Wagyu Halal	7
Pending Matters	8
Progress Reports	9-10

Bulletin Attani Tokyo



ATASE PERTANIAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

5-2-9 Higashi Gotanda

Phone: (81) 3-3447 - 6364 Fax: (81) 3-3447 - 6365 E-mail: agriculture@kbritokyo.jp



Great Giant Foods

Pada saat berlangsung Open House KBRI Tokyo, Atase Pertanian menerima kunjungan dari Great Giant Foods (GGF) Japan Ltd yang bermaksud menyampaikan permintaan impor buah segar asal Indonesia. Akira Kato, Senior Manager Market Development dan Kentaro Ishizuka, Sales Manager telah memperhatikan peluang pasar buah alpukat segar yang semakin meningkat di Jepang. Great Giant Foods Japan Ltd adalah perusahaan pengimportir buah nanas dan pisang dari Indonesia yang diproduksi Great Giant Pineapples di Provinsi Lampung.

"Pasar buah alpukat sangat menjanjikan di Jepang. Setiap tahun impor Jepang meningkat pesat seperti buah pisang dan nanas. Kami berharap Indonesia terus berjuang untuk memperoleh tambahan kuota ekspor pisang dan nanas. Kami juga berharap Pemerintah Indonesia mengajukan ijin ekspor buah alpukat agar prosedur karantina bisa segera dimulai" pesan Kato.

"Kami telah meminta kepada Pemerintah Jepang tambahan kuota ekspor pisang dan nanas menjadi 10 ribu ton dan 8 ribu ton per tahun. Namun hingga saat ini belum disetujui. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pun belum mencapai kesepakatan hingga pertemuan Mei 2019 yang lalu. Kembali tentang buah alpukat ini karena merupakan permintaan baru maka kami akan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura agar ditindaklanjuti dengan permohonan ijin ekspor buah alpukat ke Jepang" jawab Nuryanti.

"Kenaikan permintaan buah alpukat ini cukup besar, dari 57 ribu ton menjadi 74 ribu ton dalam lima tahun di Jepang itu termasuk luar biasa. Peluang pasar ini sangat menarik bagi kami pelaku bisnis buah-buahan segar. Saat ini alpukat masih diimpor dari Amerika Serikat (AS), Meksiko, Selandia Baru, Viet Nam, Peru, Chili, dan pada tahun 2018 mulai datang dari China dan Australia. Kalau kita perhatikan jenis buah yang dilarang masuk ke Jepang rasanya proses perijinan ekspor buah alpukat tidak akan serumit dan sepanjang buah mangga. Kalau boleh tahu, ijin ekspor buah mangga sudah sampai mana?" imbuh Kato.

"Saya juga berharap demikian untuk proses ijin ekspor buah alpukat ini karena Jepang tidak menghasilkan sendiri, sehingga tidak menimbulkan sensitivitas terhadap isu perlindungan kepada petani domestik. Apakah GGF menetapkan kriteria tertentu? Kalau tentang ijin ekspor buah mangga sudah memasuki tahap ketujuh dari tiga belas tahap yang ada. Pada tanggal 26 Maret 2019 MAFF mengirim surat konfirmasi hasil evaluasi JICA pada perlakuan mangga menggunakan Vapour Heat Treatment (VHT) di Indonesia" jelas Nuryanti.

"Kami punya kapasitas usaha dan jaringan pasar yang mapan di Jepang. Kami optimis mau mengimpor lima kontainer alpukat segar setiap minggu. Untuk buah kami minta yang 200-250 gram/buah. Tentang jenis, kami tidak minta spesifik, tapi kalau memungkinkan diutamakan varietasnya Hass" jawab Kato.



Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Attani menyampaikan permintaan impor GGF kepada Direktur Jenderal Hortikultura guna ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan ijin ekspor ke MAFF sebagai prosedur baku Evaluation for the Request from Exporting Country for Lifting a Ban on Plant Impor sebagaimana diatur dalam Article 7.1 Plant Protection Act of Japan.

Tokyo, 5 Juni 2019



Hal. 2 Volume 2, Nomor 6

Magang Petani Muda



Bertempat di Hotel 1-2-3 Maebashi Mercury, Gunma pada tanggal 7 Juni 2019 dilakukan acara Sayonara Party bagi peserta magang petani muda di Jepang (Ikamaja) angkatan 34 dan sekaligus Welcome Party untuk angkatan 36 yang diselenggarakan International Association for Agricultural Exchange (IAEA) Prefektur Gunma. Hadir pada acara tersebut tiga angkatan Nogyou Jishusei, yaitu 34, 35, dan 36. Periode magang ketiga angkatan ini tidak sama, tergantung prefektur penyelenggara. Magang di Prefektur Gunma berlangsung selama 2 tahun, sedangkan di Prefektur Saitama berlangsung selama 3 tahun.

Direktur IAEA Gunma, Kazunori Saida pada kesempatan tersebut tidak saja melepas dan menyambut pemagang dari Indonesia, melainkan juga melepas peserta magang dari Thailand. Empat belas pemagang asal Indonesia yang diketuai oleh Kadek Adi Suarsana menerima sertifikat magang. Dua belas pemagang dijadwalkan kembali ke tanah air pada tanggal 2 Agustus 2019 dan dua orang pemagang akan kembali ke tanah air pada bulan September 2019.

"Kami bahagia bisa menerima kalian, anak muda yang penuh semangat kerja, berkelakuan baik, tekun belajar, hormat, dan patuh kepada kami yang ada di sini. Meskipun kami merasa kehilangan, kami bangga kalian akan kembali ke tanah air untuk meneruskan ilmu yang diperoleh guna membangun pertanian di daerah asal. Tetaplah bersemangat untuk meraih mimpi dan jangan lupakan kenangan serta ilmu yang telah diperoleh di sini. Kami pun berbahagia menyambut kedatangan anak muda yang tampak penuh semangat untuk belajar pertanian di Gunma ini, menggantikan senior yang akan segera kembali ke tanah air" sambut Saida penuh rasa haru.

"Kami merasa dua tahun berguru di Gunma ini demikian singkat. Selama kami berada di sini, kami tidak saja memperoleh ilmu pertanian, namun juga ilmu bahasa, budaya, dan ilmu pengetahuan lain yang sangat berharga. Terima kasih telah menerima kami sebagai bagian keluarga dan memberi banyak pembelajaran untuk masa depan kami. Dengan kemajuan teknologi kami berharap agar alumni dan IAEA dapat terus menjalin komunikasi, sehingga kami tetap merasakan kekompakan selama di Jepang" ungkap Suarsana mewakili alumni angkatan 34.



Petani muda yang magang di Prefektur Gunma dan Saitama diterima petani hortikultura dan peternak sapi perah. Jenis tanaman yang dibudiayakan antara lain adalah tomat cherry, ketimun, dan sayuran daun lainnya. Budidaya sayuran dilakukan di dalam dalam green house, sehingga ketika musim dingin tiba, petani masih dapat melanjutkan usahanya menanam sayuran. Dengan demikian pemagang masih dapat beraktivitas merawat tanaman di dalam green house serta membersihkan peralatan dan mesin pertanian untuk persiapan musim tanam yang akan datang saat musim semi tiba. Pemagang di peternakan sapi perah pun tetap dapat melakukan pemeliharaan sapi dan kandang selama musim dingin karena pakan ternak sapi perah berupa konsentrat, kulit gandum, dan jerami kering.

Narasumber: Kadek Adi Suarsana.

Mitra Baru Pemagangan

Setelah melalui serangkaian pertemuan dengan Atase Pertanian dan dikomunikasikan dengan Pusat Pelatihan Pertanian, pada tanggal 11 Juni 2019 President Toshi Fusao Yuji (TFY) Co Ltd, Itabashi Yuji menyampaikan kesiapannya memulai kerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan magang.

Awalnya, pada tanggal 14 Mei 2019 utusan TFY Co Ltd Japan, Youhei Tsukada dan Szoyo Fujita bertemu dengan Atase Pertanian untuk menyampaikan permohonan kerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian guna menyelenggarakan magang di usahatani daun bawang di Prefektur Ibaraki Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2019 Tokyo, Atase Pertanian menyampaikan surat nomor 25 /TANI/V/2019 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Permohonan kerjasama TFY Ltd untuk mendatangkan petani muda sebagai pemagang pada usahatani daun bawang di Prefektur Ibaraki Jepang yang ditanggapi secara positif oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Pada tanggal 23 Mei 2019 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menyampaikan Draft Nota Kesepahaman Kerjasama Magang Petani Muda dengan TFY Co Ltd. Setelah mempelajari draft tersebut, TFY bermaksud memulai kerjasama magang dengan didahului penandatanganan Nota Kesepahaman yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 di BPPSDMP, Gedung D, Lantai 7, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rencananya, President TFY, Itabashi Yuji akan hadir menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Magang Petani Muda dengan didampingi oleh Director of Project Department (Syozo Fujita), serta dua orang Manager of Project Department, yaitu Hiroko Tsuno dan Youhei Tsukada.



"Kami akan menerima 12 petani muda secara bertahap mulai bulan April atau Mei 2020. Pada setiap tahap kedatangan empat orang, sehingga dalam tiga tahap kedatangan akan mencapai jumlah 12 orang dalam setahun. Kami berharap agar pemagang yang kami terima usianya dua puluh tahun atau lebih, sehingga selama magang usianya masih produktif, kuat untuk bekerja pada kondisi dengan iklim yang tidak sama dengan Indonesia" jelas Yuji.

"Dengan kondisi lingkungan kerja yang menurut anda memerlukan petani muda usia produktif yang kuat bekerja di bawah cuaca tidak biasa, apa fasilitas yang diberikan kepada pemagang?" tanya Nuryanti.

"Kami akan memberi tunjangan magang sebesar enam puluh ribu yen per bulan untuk biaya makan sehari-hari" imbuh Yuji.

"Untuk tempat tinggal, kami akan meniru pioneer kami penyelenggara magang petani muda, yaitu Ibaraki Chuo Engei, di mana pemagang tinggal terpisah dengan petani. Oleh karena itu, kami akan gunakan cara yang sama" terang Yuji.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara TFY dengan BPPSDMP pada tanggal 5 Juli 2019 nanti, maka TFY akan menjadi mitra baru bagi BPPSDMP dalam penyelenggaraan magang petani muda di Jepang. Selain TFY, terdapat calon mitra lain, yaitu Pemerintah Kota Yokote dari Prefektur Akita yang telah menyampaikan proposal kerjasama magang petani muda kepada BPPSDMP. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, Pemkot Yokote akan mengutus Kepala Departemen Pertanian & Kehutanan, Kakizaki Hiroyuki untuk bertemu dengan BPPSDMP pada tanggal 24 Juli 2019 guna mendiskusikan draft Nota Kesepahaman lebih lanjut. Pemkot Yokote juga diagendakan mengunjungi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Ciawi untuk bertemu dengan calon pemagang dan melihat fasilitas pelatihan dan pendidikan SDM Pertanian di Indonesia.



Tokyo, 11 Juni 2019.

Hal. 4 Volume 2, Nomor 6

Mango Network

Dalam rangka memfasilitasi ekspor mangga segar ke Jepang yang menghadapi kendala teknis ketidaktersediaan VHT skala komersial yang disyaratkan Pemerintah Jepang, Atase Pertanian menjalin kerjasama dengan Indonesia Japan Investor Network (IJIN) untuk membangun mango network. Pada tanggal 31 Mei 2019, Atase Pertanian bertemu Michiko Tamatsukuri, Direktur IJIN berbagi komunikasi dengan pihak yang terkait dengan mango network yang akan dibangun. Pada tanggal 5 Juni 2019 Atase Pertanian kembali bertemu dengan Michiko menyampaikan kesediaan Nakamura Hidohide, President Commisioner A-Wing International untuk bertemu IJIN dalam rangka mango network.

"Saya sudah membuat meeting appointment dengan Nakamura untuk bertemu IJIN di Fukuoka pada tanggal 10 Juni 2019 mendiskusikan rencana investasi VHT dengan bantuan relasi IJIN di Indonesia dan Jepang" terang Nuryanti.



"Terima kasih arrangementnya. Secara paralel, kami akan lakukan dua hal. Pertama, berkonsultasi dengan FTH Co Ltd tentang Summary of Evaluation Result of the Project for Standardization and Quality Control for Horticulture Products of Indonesia (Improvement of Thermal Treatment against Fruit Flies on Fresh Mango) yang disampaikan Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada MAFF. FTH Co Ltd ini supplier VHT yang digunakan produsen buah negara asal impor buah segar di Jepang. Kedua, berembug dengan A-Wing International. Jika nanti A-Wing International merealisasikan investasinya, kami hanya akan rekomendasikan VHT dari supplier yang hasil treatmentnya telah memperoleh ijin ekspor dari Pemerintah Jepang, yaitu FTH Co Ltd" jawab Michiko pada pertemuan tanggal 12 Juni 2019.

Pada tanggal 18 Juni 2019, Michiko memberi kabar baik tentang minat besar dari A-Wing International untuk berinvestasi VHT. Kabar tersebut memberi harapan bagi Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan ekspor mangga ke Jepang yang hanya akan menerima mangga segar yang telah diberi perlakukan menggunakan VHT dan bukan Hot Water Treatment (HWT) sebagaimana diusulkan Indonesia. Pada tanggal 25 Juni 2019, melalui surat elektronik FTH Co Ltd menyampaikan penjelasan bahwa VHT yang dievaluasi JICA di Indonesia tidak berasal dari pabrik yang produknya telah memperoleh persetujuan ekspor ke Jepang. Lebih lanjut FTH Co Ltd menerangkan pengalamannya selama 41 tahun memproduksi VHT yang telah digunakan Plant Protection Station MAFF, Japan Fumigation Technology Association serta negara sumber impor buah Jepang, seperti Taiwan, Thailand, Viet Nam, Myanmar, India, Pakistan, dan Australia. VHT produksi FTH Co Ltd telah terbukti berhasil mencegah proliferasi hama dan penyakit karantina tumbuhan, khususnya lalat buah (Bactrocera dorsalis species complex) pada buah mangga, manggis, leci, stroberi, dan alpukat.

"Pekerjaan rumah IJIN sekarang adalah mempertemukan eksportir mangga di Indonesia dan importir mangga di Jepang. Untuk mengetahui eksportir mangga, IJIN akan bertemu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada tanggal 5 Juli 2019 di Direktorat Jenderal Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta. Dengan jaringan bisnisnya A-Wing International akan mencari mitra di Jepang sebagai importir mangga asal Indonesia" tulis Michiko melalui surat elektronik.

Tokyo, 12 Juni 2019.



Sumber: FTH Co Ltd Japan

Kebijakan Energi Terbarukan

Kebijakan energi terbarukan Pemerintah Jepang telah membawa kepada masalah permintaan, pasokan, dan standar karena salah satu bahan bakar yang akan digunakan sebagai pembangkit energi/listrik di Jepang adalah minyak kelapa sawit yang banyak ditimpa isu lingkungan dan tenaga kerja. Data tahun 2018 menunjukkan total volume impor minyak sawit Jepang mencapai 70,60 ton dalam bentuk stearin yang digunakan untuk pembangkit listrik sebanyak 12,30 ribu ton dan sebagai minyak makan sebanyak 58,30 juta ton. Sementara itu, tiga perusahaan energi di Jepang memerlukan 150 ribu ton/tahun bahan bakar untuk memproduksi listrik.

Sebagai upaya untuk memastikan biomassa bahan bakar energi berasal dari pengelolaan yang legal dan dibuktikan dengan sertifikat yang menjamin keberlanjutan usaha untuk memenuhi permintaan pasar, maka Pemerintah Jepang melalui Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) membuat kontrak jangka panjang selama 20 tahun untuk menjamin pasokan yang stabil. Apabila di dalam 10 tahun kontrak pasokan tidak stabil, maka METI akan mengenakan penalti untuk penutupan kontrak dan mengalihkan kontrak pada pemasok lain.

• Under the Feed-in Tariff scheme, if a renewable energy producer requests an electric utility to sign a contract to purchase electricity at a fixed price and for a long-term period guaranteed by the government, the electric utility is obligated to accept this request. Sale of electricity produced Those engaged in the power generation business using renewable energy from renewable energy Electricity supply sources Electric utility Solar PV Purchase of electricity at a fixed price for a government Collection of surcharge Payment for the Submission of together with the electricity charge purchase cost the collected guaranteed period surcharge Surcharge adjustment organization (organization to collect and distribute the surcharge) Electricity customers Deciding tariffs and durations, respecting the opinion of the specia committee (every fiscal year) unit price per kWh (every fiscal year) Government Those who generate power at home · Approval of facilities Opinion on tariffs and duration

Basic mechanism of the Feed-in Tariff scheme

Sumber: Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Japan

Special committee for determination of tariff s and durations

Saat ini produksi minyak nabati dunia yang bersertifikat sebanyak 12 juta ton/tahun, di mana minyak kelapa sawit mencapai 64,76 juta ton/tahun. Minyak nabati bersertifikat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) sebanyak 6 juta ton/tahun, bersertifikat lainnya (The International Sustainability and Carbon Certification/ISCC) sebanyak 6 juta ton/tahun, bersertifikat Identity Preserved (IP)/Segregated (SG) sebanyak 3 juta ton/tahun, serta bersertifikat Mass Balance (MB) sebanyak 3 juta ton/tahun. Di lain pihak, permintaan minyak nabati bersertifikat IP sebanyak 1,76 juta ton/tahun, SG sebanyak 1,56 juta ton/tahun, MB sebanyak 1,19 juta ton/tahun, serta Booked & Claim (B & C) sebanyak 1,64 juta ton/tahun, sehingga total mencapai 6,15 juta ton/tahun.

Standar tinggi yang diberlakukan Jepang dengan sertifikasi IP/SG sebagai persyaratan wajib menimbulkan masalah bagi perusahaan pembangkit energi. Akibat peningkatan biaya premium minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO-SG sebesar ¥6.000 - ¥10.000 per ton, maka permintaannya menjadi kecil di Jepang. Saat ini biaya sertifikasi RSPO-SG untuk minyak sawit refined, bleached and deodorized (RBD) berkisar ¥5.500 - ¥7.700 per ton, sedangkan untuk sertifikasi MB hanya ¥3.300 per ton. Apabila sertifikasi SG berlaku untuk RBD stearin, maka biayanya akan menjadi ¥10.000 per ton. Ketika dikonversi menjadi pada tingkat penggunaan di pembangkit listrik (kelas 38 MW), maka diperlukan biaya tambahan sebesar ¥800 juta/tahun. Kondisi ini menimbulkan masalah pada keberlanjutan usaha pembangkit energi/produsen listrik, yaitu tambahan biaya pengadaan dan penalti apabila terjadi pelanggaran kontrak.

Bagi Pemerintah Jepang, mengamankan palm stearin bersertifikat RSPO-SG dengan jumlah yang stabil pun sulit. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang melalui METI melakukan langkah-langkah untuk memastikan keterlacakan dari perusahaan pemasok di negara produsen minyak kelapa sawit ke pabrik minyak kelapa sawit serta sistem manajemen dan sertifikasi guna mengakomodasi permintaan pasar dengan jaminan keberlanjutan produksi dan pasokan yang stabil. Pemerintah Jepang memberi tenggang waktu dua tahun kepada produsen minyak kelapa sawit bersertifikat selain RSPO-SG untuk melakukan kesetaraan dengan RSPO dalam empat aspek keberlanjutan. Tenggang waktu tersebut diberikan kepada minyak kelapa sawit dengan sertifikat MSPO (Malaysia Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Pada tanggal 27 Mei 2019 dilakukan Hearing Session and Explanation terkait Sertifikasi ISPO dan MSPO bersama Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), METI untuk mengkonfimasi aspek keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan, konflik pangan dan bahan bakar, serta hukum dan peraturan dari ISPO dan MSPO. Pada tanggal 14 Juni 2019 METI mengirim kuesioner yang berisi 40 pertanyaan tentang empat aspek keberlanjutan dan perihal lain terkait ISPO. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain telah menyampaikan jawaban kepada METI pada tanggal 28 Juni 2019. Setelah menerima jawaban tersebut, METI mengirim tim analis yang berasal dari Environment and Energy Department, Policy Research & Consulting Division, Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co. Ltd.

Untuk mendalami jawaban kuesioner yang telah disampaikan. Kementerian Pertanian bersama Kemeko Bidang Ekonomi, KLHK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri serta asosiasi dan pelaku usaha kelapa sawit akan bertemu dengan tim analis pada tanggal 4 Juli 2019 di Direktorat Jenderal Perkebunan, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka mempercepat keberterimaan Pemerintah Jepang terhadap sistem sertifikasi ISPO sebelum akhir masa tenggang, 31 Maret 2021.

Tokyo, 14 Juni 2019.

Hal. 6 Volume 2, Nomor 6

Negotiation Lunch



Atase Pertanian bersama Koordinator Fungsi Ekonomi, Retno Supeni dan Koordinator Fungsi Politik Andi Ardiansyah mewakili Duta Besar memenuhi undangan jamuan makan siang dari Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs (MOFA) of Japan (Wakil Menteri Luar Negeri), Kiyoto Tsuji. Hadir mendampingi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Jepang pada jamuan makan siang Akira Yokochi, Director of Economic Policy Division dan Shinichi Sato, Principal Deputy Director of Economic Division.

Selama makan berlangsung Wamenlu Jepang menanyakan tindak lanjut dari Bilateral Meeting antara Menteri Ministry of Agriculture, Forestry and Fishries (MAFF) Jepang, Takamori Yoshikawa dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman pada tanggal 11 Mei 2019 selama berlangsungnya G20 Agriculture Ministers' Meeting di Prefektur Niigata.

"MOFA berdiri di depan untuk menjadi juru runding MAFF yang mulai menyadari pentingnya membuka diri bekerja sama dengan negara lain untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan, terutama dengan negara mitra yang telah lama menjalin hubungan kerjasama seperti Indonesia. Meskipun Jepang menjamin produk pertanian dan pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi karena standar kemanan dan kesehatan pangan yang tinggi, kegiatan ekspor dan impor menjadi keharusan" urai Tsuji.

"Benar, di era globalisasi ini kita tidak boleh menutup pasar, sehingga suatu negara tidak bisa mempertahankan diri untuk mengekspor saja tapi tidak mau menerima impor. Harus ada goodwill untuk melakukan keduanya dengan diselaraskan pada kebijakan ekonomi nasional" sambut Nuryanti.

"Director of Plant Protection Division MAFF, Kenji Matsuoka berpesan pada saya menanyakan tanggapan Indonesia atas suratnya terkait prosedur pencabutan larangan impor mangga" imbuh Tsuji.

"Kementerian Pertanian sudah menyiapkan surat tanggapan untuk itu dan akan segera kami sampaikan kepada MAFF, sehingga ada kemajuan tahap dari Evaluation for the Request from Exporting Country for Lifting a Ban on Plant Impor untuk mangga" jawab Nuryanti.

Pada tanggal 20 Juni 2019, Atase Pertanian menyampaikan surat 10880/KR.020/K.3/06/2019 dari Acting Director Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Kesehatan Hayati, Badan Karantina Pertanian menanggapi surat Director of Plant Protection Division MAFF bernomor 30/Shouan/6197 tanggal 26 Maret 2019. Dengan surat tanggapan tersebut, terjalin komunikasi dua arah, sehingga Indonesia bergerak memasuki tahap ketujuh dari 13 tahap prosedur pencabutan larangan impor untuk komoditas buah mangga segar. Pemerintah Jepang mensyaratkan perlakuan menggunakan Vapour Heat Treatment (VHT) untuk buah mangga segar yang akan diekspor ke Jepang. Karena pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomi, Pemerintah Indonesia bernegosiasi untuk menggunakan Hot Water Treatment (HWT) guna menghilangkan lalat buah beserta telur dan larvanya sebelum mangga segar diekspor ke Jepang.

Selain buah mangga lokal yang diproduksi di Kepulauan Okinawa serta Prefektur Kagoshima dan Miyazaki, saat ini Jepang mengimpor mangga segar dari Meksiko, Thailand, Peru, Taiwan, Filipina, Brazil, Pakistan, India, Australia, Amerika Serikat, Viet Nam, Malaysia, dan Republik Dominika. Volume impor buah mangga di Jepang selama 2014-2018 rata-rata kurang dari 7 ribu ton/tahun. Volume ini lebih kecil dibandingkan impor buah alpukat segar. Ijin ekspor buah mangga segar ke Jepang menjadi penting karena Jepang merupakan barometer standar keamanan dan kesehatan produk pangan dan pertanian di dunia. Apabila suatu produk pangan dan pertanian telah diterima masuk ke pasar Jepang, maka negara lain cenderung untuk mengikuti langkah Jepang membuka pasar untuk produk yang sama.



Tokyo, 18 Juni 2019.

Sumber: Ministry of Agriculture, Forestry and Fishries (MAFF) Japan

Wagyu Halal

Huddle Tombo perusahaan eksportir daging wagyu bertemu dengan Atase Pertanian untuk memperoleh penjelasan tentang sertifikasi halal di Indonesia. Ruji Nakamura, CEO dan Tomoki Nakazaki, Manager bermaksud mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari Japan External Trade Organization (JETRO) tentang sistem sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia mulai 30 Juni 2019.



"Kami telah mengekspor daging wagyu ke Indonesia bersertifikat halal yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia dengan merek Zenkaimeat. Menurut informasi yang kami peroleh, setelah tanggal 30 Juni 2019 sertifikasi halal mana pun bisa digunakan di Indonesia. Apakah benar demikian?" tanya Nakamura.

"Apakah dengan peraturan baru tersebut kami bisa mengekspor daging wagyu tanpa sertifikat halal ke Indonesia?" imbuh Nakazaki.

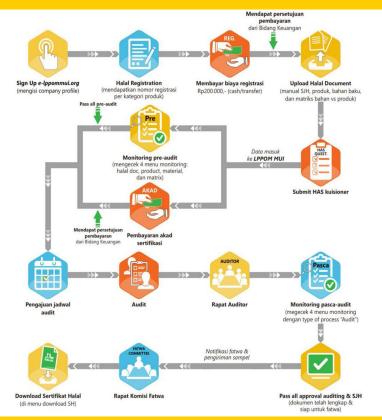
"Menurut informasi yang kami peroleh dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, maka setiap perusahaan wajib memiliki sertifikat halal. Yang berubah hanya pengelola sertifikat halal. Semula diamanahkan pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), namun saat ini sertifikat halal dikelola oleh Badan Penanggulangan Jaminan Produk Halal (BPJPH)" terang Nuryanti.

"Jika demikian, kalau kami akan mengekspor daging wagyu ke Indonesia dengan sertifikat halal yang dikeluarkan di Jepang apakah bisa?" tanya Nakamura lebih lanjut.

"Pengelola sertifikat halal Pemerintah Jepang tetap harus melakukan harmonisasi dengan BPJPH terlebih dahulu, sehingga memenuhi standar halal yang berlaku di Indonesia. Prinsip dan prosedur sertifikasi halal masih sama. Yang berubah hanya lembaga pengelolanya saja" jawab Nuryanti.

"Terima kasih atas penjelasannya. Kami akan mengikuti prosedur baku yang berlaku di Indonesia, sehingga ekspor daging wagyu kami dapat berkesinambungan" pungkas Nakamura.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo telah menerima surat dari Pemerintah Lithuania dan Paraguay untuk mengekspor produk peternakan ke Indonesia. Lithuania bermaksud mengekspor produk susu dan telur, sedangkan Paraguay bermaksud untuk mengekspor daging sapi beku. Kedua permohonan ijin ekspor produk peternakan tersebut merupakan dampak dari dua keputusan Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kebijakan impor Pemerintah Indonesia melanggar aturan WTO. Keputusan DSB yang pertama terkait kasus kebijakan impor produk hortikultura serta hewan dan produk hewan yang digugat secara terpisah oleh Selandia Baru (DS-477) dan Amerika Serikat (DS-478). Karena kedua gugatan dipandang saling terkait, maka kedua kasus sengketa tersebut ditangani DSB secara bersamaan. Dalam DS-477/DS-478, sebagai penggugat adalah Selandia Baru, sedangkan AS sebagai rekan penggugat (co-complainants). Keputusan DSB yang kedua terkait kebijakan impor ayam dan produk ayam Indonesia yang digugat oleh Brazil dan dinamai DS-484.



Tokyo, 19 Juni 2019. Sumber: LP POM MUI

Hal. 8 Volume 2, Nomor 6

Pending Matters

EKSPOR PRODUK OLAHAN DAGING SAPI

Pada tanggal 28 Februari 2019 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan dua surat ke dua kementerian di Jepang.

Pertama, surat nomor 28.097/Pl.500/F/02/2019 yang ditujukan kepada Director of Office of Import Food safety Division, Pharmaceutical Safety and Environment Health Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) of Japan sebagai pengantar atas kuesioner tentang Equivalency Assessment of Standards and Regulations in Abbatoir (General Provisions). Saat ini MHLW masih menunggu terjemahan dalam Bahasa Inggris dari dokumen peraturan dan undang-undang yang dicantumkan di dalam jawaban kuesioner.

Kedua, surat nomor 28.099/PI.500/F/02/2019 ditujukan kepada Director of Animal Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, MAFF sebagai pengantar atas kuesioner tentang Animal Health Situation for Cloven-Hoofed Animal in Republic of Indonesia. MAFF belum memberi tanggapan atas surat kedua dimaksud.

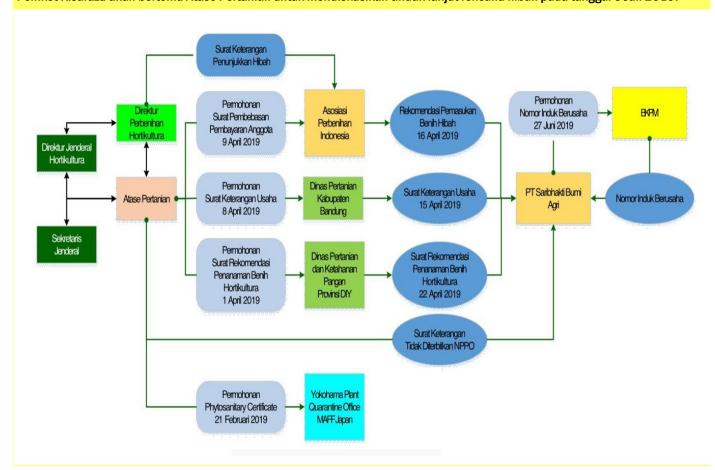


HIBAH BIBIT BLUEBERRY

Permohonan ijin impor bibit blueberry hibah dari Pemerintah Kota Kisarazu, Prefektur Chiba masih di Dashboard Verifikator Level 1. Atase Pertanian telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Jepang dan Indonesia terkait impor 400 batang Rabbit Eye Blueberry (Vaccinium Virgatum Aiton) hibah dari Walikota Pemerintah Kota Kisarazu, Prefektur Chiba, Jepang kepada Kementerian Pertanian, Republik Indonesia yang berasal dari Ezawa Blueberry Fruitland dengan alamat 3832, Mariyatsu, Kisarazu, Prefektur Chiba, Jepang.

Plant Quarantine Office MAFF Japan akan mengeluarkan Phytosanitary Certificate apabila Surat Ijin Impor telah diterbitkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pemkot Kisarazu akan bertemu Atase Pertanian untuk mendiskusikan tindak lanjut rencana hibah pada tanggal 5 Juli 2019.



Progress Reports

EKSPOR STEAMED FEATHER MEAL

Pada tanggal 19 Juni 2019, Director of Animal Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), menyampaikan surat dengan nomor 1/shouan/867 tentang ekspor steamed feather meal untuk bahan baku pupuk dari Indonesia ke Jepang. Surat tersebut menjawab surat Kabadan Karantina Pertanian nomor 5873/KR.140/K/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang permohonan persyaratan kesehatan impor steamed feather meal ke Jepang.

Surat yang ditujukan kepada Kabadan Karantina Pertanian tersebut menyertakan dua berkas, yaitu Animal Health Requirements (AHRs) dan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk steamed feather meal sebagai bahan baku pupuk.

Kementerian Pertanian (Badan Karantina dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) mempersiapkan jawaban atas kuesioner guna memenuhi tahapan lifting import ban on the steamed feather meal to be exported to Japan.



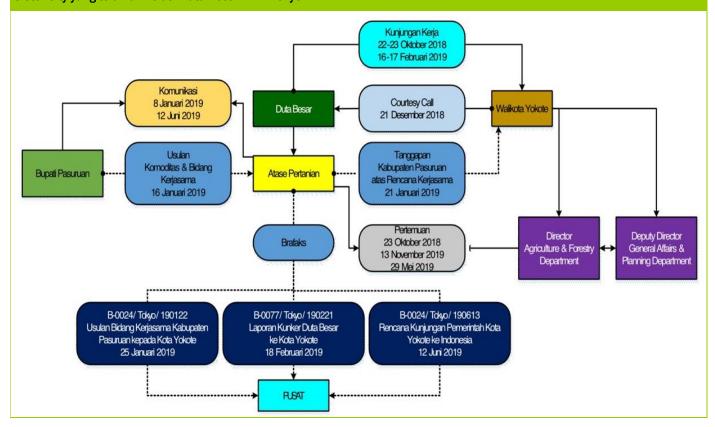
AROMATIC INVESTMENT

Ogawa Co Ltd Japan yang berencana menjalin kerjasama kemitraan dengan Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia (KBHI) dalam memproduksi bahan baku aroma dan wewangian akan melakukan survei ke kebun lada hitam, panili, kapulaga dan nilam.

Tim dari Ogawa Co Ltd Japan yang terdiri dari Hiromi Atarashi (Purchasing Division) dan Shinpei Miyake (Material Research & Development) diagendakan untuk melakukan survei bersama ketua KBHI dan Kepala Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultuta, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 2019.

SISTER CITY YOKOTE CITY—KABUPATEN PASURUAN

Pemerintah Kota Yokote, Prefektur Akita, Jepang diagendakan bertemu Bupati Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 23 Juli 2019 dengan didampingi Atase Pertanian untuk melakukan perkenalan secara resmi, menjajaki bidang kerjasama di bawah payung Sister City yang telah diinisiasi Duta Besar KBRI Tokyo.



Hal. 10 Volume 2, Nomor 6

Progress Reports

TEKNOLOGI BESTERS

Hitachi Ltd, perusahaan energi terkemuka di Jepang yang telah menemukan terobosan teknologi dekomposisi biomassa kayu bernama Biomass Energy Solution Technology for Environmental Recycling Society (BESTERS) akan melakukan uji coba teknologi BESTERS tersebut pada bagasse pada pabrik gula dan tandan kosong pada pabrik kelapa sawit di Indonesia dalam bentuk pilot project dengan biaya dari Pemerintah Jepang.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk memitigasi dampak pemanasan global di Jepang serta permohonan Pemerintah Republik Indonesia atas keberterimaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Jepang, tim Hitachi dijadwalkan bertemu dengan Sekretariat Komisi ISPO.

Pada tanggal 26 Juni 2019 Atase Pertanian bersurat kepada Direktur Utama PTPN VII, Direktur Utama PTPN X, Direktur Utama PT Rajawawali Nusantara Indonesia (PERSERO), dan Direktur Jenderal Perkebunan untuk menyampaika rencana pertemuan dan kunjungan Hitachi Ltd.

Hitachi Co Ltd telah diagendakan untuk bertemu dan melakukan survei lapangan di PTPN VIII pada tanggal 23 Juli 2019, di PTPN X pada tanggal 24 Juli 2019, dan di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada tanggal 25 Juli 2019.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Hitachi Co Ltd dijadwalkan bertemu Sekretariat Komisi ISPO di Direktorat Jenderal Perkebunan. Address of the Meeting and Visit:

PTPN VIII

Meeting & Visit:
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Cikasungka
Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 16660

PTPN X

Meeting:

Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara X Jalan Jembatan Merah no 3-11 Surabaya, Jawa Timur Coordinate - 7°14'16.0"S 112°44'15.0"E

Vicit

Pabrik Gula Kremboong Desa Krembung, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo. Coordinate - 7°30'45.1"S 112°37'13.1"E

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

Meeting & Visit:

Pabrik Gula (PG) Madukismo PT Madubaru Kasihan Bantul Desa Padokan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Rogocolo, Tirtonirmolo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55181

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Meeting:

ISPO Secretariat

Room 5.09

Directorate General of Estate Crop

C Building, 5 th Floor

Jl. Harsono RM no.3 Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

JAVA TEA JAPAN

Menindaklanjuti permintaan impor teh dari Java Tea Japan (JTJ) Atase Pertanian merekomendasikan PT Pagilaran yang telah berpengalaman memasok teh kepada Unilever Japan dengan carton box untuk grade PF II serta kepada Shimizu dengan carton box dan paper sack untuk grade PF II.

PT Pagilaran telah mengirim sampel produk dan dinyatakan sesuai spesifikasinya oleh pihak Java Tea Japan. Dengan kapasitas produksi 40 ton/bulan, pada tanggal 28 Juni 2019 PT Pagilaran menyatakan kesiapannya untuk memasok permintaan JTJ untuk grade Dust. Saat ini PT Pagilaran menunggu inquiry dari Java Tea Japan.

PT Pagilaran menyampaikan penawaran minimal pemesanan satu pallet sesuai kemasan yang diinginkan JTJ. Setiap pallet akan berisi 20 paper sack (1.160 kg) atau 30 cartons box (750 kg). Metode pengiriman yang ditawarkan PT Pagilaran adalah FAS/FOB melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang atau Tanjung Priok, Jakarta.

Sayangnya, jenis teh Waland Blend dengan spesifikasi formula 25% PF Ortodoks, 55% PD CTC, dan 20% D1 CTC tidak dapat dipenuhi oleh PT Pagilaran.

PF ORTODOKS = 25%
PD CTC = 55 %
D 1 CTC = 20%